RUTINKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN

Komunitas Malioboro Jamin Keamanan Pengunjung

YOGYA (KR) - Komunitas Malioboro siap menjamin keamanan pengunjung selama berwisata di kawasan Malioboro. Selain komitmen menerapkan protokol bagi para pelaku, mereka secara berkala juga akan menyemprotkan disinfektan di area publik sepanjang Malioboro.

Koordinator Komunitas Malioboro Bersatu Slamet Santoso, mengungkapkan pihaknya bersama 14 komunitas yang ada sepakat untuk rutin menggelar kerja bakti berupa menyemprotkan disinfektan. "Seminggu tiga kali yakni tiap Minggu, Selasa dan Jumat. Semuanya kami lakukan secara swadaya untuk menjaga keamanan pengunjung, terutama rekan-rekan pedagang, pengayuh becak, pengasong, seniman dan para pelaku lainnya," ungkapnya di sela penyemprotan disinfektan, Minggu (6/12).

Di samping itu, upaya tersebut juga bagian dari keprihatinan atas melonjaknya kasus konfirmasi positif Covid-19 di DIY yang terjadi belakangan ini. Dengan aksi dari Komunitas Malioboro Bersatu diharapkan mampu menekan laju pertambahan kasus di DIY, khususnya potensi penularan di Malioboro.

Slamet mengaku, anggota komunitas di Malioboro selalu menerapkan protokol umum pencegahan Covid-19. Terutama tidak pernah melepas masker, rutin mencuci tangan dengan sabun serta saling menjaga jarak satu sama lain.

"Wastafel juga telah kami sediakan di sepanjang Malioboro. Para PKL juga rutin memantau air maupun sabunnya sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu," akunya.

Meski demikian pihaknya akan terus memantau pelaksanaan protokol kesehatan jajaran anggotanya sampai akhir tahun. Menurutnya, disiplin protokol tidak bisa dilonggarkan apalagi wisatawan sudah mulai berdatangan. Libur panjang akhir tahun ini pun diprediksi Malioboro bakal dipadati wisatawan luar daerah. Dengan begitu, semua pihak harus bisa saling menjaga agar tidak terpapar oleh virus. "Kami sebagai pelaku wisata pasti mengharapkan kunjungan wisatawan, tetapi aspek kesehatan di tengah pandemi ini juga tidak bisa disepelekan. Harapan kami wisatawan juga menerapkan protokol kesehatan selama berlibur di sini," katanya. **(Dhi)-f**

KR-Istimewa

Aksi penyemprotan disinfektan oleh Komunitas Malioboro Bersatu, Minggu (6/12).

PROSES PEMBERKASAN SELESAI

Tiga CPNS Pemda DIY Mengundurkan Diri

YOGYA (KR) - Proses pemberkasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemda DIY, sudah selesai dilakukan dan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski secara umum proses pemberkasan lancar dan tidak ada kendala yang berarti, namun dari 691 CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi, tiga di antaranya mengundurkan diri.

"Sebetulnya total formasi dalam seleksi CPNS Pemda DIY tahun 2019 ada 717 orang. Tapi setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi, dari 717 formasi yang disediakan hanya terisi 691 formasi. Sebanyak 691 peserta yang dinyatakan lolos, sampai batas akhir yang sudah ditentukan ada tiga peserta yang memutuskan untuk mengundurkan diri," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani kepada *KR* di Yogyakarta, Minggu (6/12).

KR-Riyana Ekawati

Amin Purwani

Diungkapkan, setelah pemberkasan selesai dilakukan dan dikirimkan ke pusat. Pihaknya berharap bisa segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) atau NIP bagi CPNS 2019 yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Adapun untuk jadwal pastinya kapan SK tersebut akan diterbitkan pihaknya belum bisa berkomentar banyak, karena masih menunggu pusat.

"Saya berharap kepada para CPNS yang sudah dinyatakan lolos nantinya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam menjalankan tugas itu, sesuai ketugasan masing-masing dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," terang Amin.

Menurut Amin, pelaksanaan seleksi CPNS di DIY dilakukan secara transparan sehingga publik bisa memantau secara langsung. Termasuk untuk nilai peserta ujian, karena hasilnya langsung keluar begitu peserta selesai mengerjakan soal. **(Ria)-f**

LINDUNGI ASET WARGA KOTA

Dewan Usul Pajak BPHTB Waris Digratiskan

YOGYA (KR) - Kalangan DPRD Kota Yogya mengusulkan agar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kepentingan waris digratiskan. Kebijakan serupa juga dapat diberlakukan untuk pajak BPHTB kepentingan hibah.

Menurut anggota DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi, dalam Perda 8/2010 pajak BPHTB ditetapkan sebanyak lima persen dari harga objek pajak. Sedangkan khusus untuk waris dan hibah ditetapkan sebesar 2,5 persen. "Dari persentasenya terkesan kecil tetapi jika dikalikan dengan harga objek pajak maka ketemunya tetap besar. Usulan kami, khusus untuk waris dan hibah tidak ada pungutan pajak," tandasnya, Kamis (3/12).

Besaran pajak 2,5 persen dinilai bisa memberatkan wajib pajak karena harga tanah dan bangunan di Kota Yogya semakin tinggi. Fahmi mengaku, dirinya sempat mendapat laporan adanya keluarga yang mendapatkan hak waris maupun hibah lebih memilih menjual karena tidak mampu membayar pajak BPHTB.

Oleh karena itu, dengan peniadaan pajak BPHTB bagi objek waris dan hibah, maka justru akan memberikan perlindungan atas haknya di Kota Yogya. Sehingga mereka tidak akan mudah dalam menjual tanah dan bangunan yang sudah menjadi asetnya.

"Harapan kami warga Kota Yogya bisa tetap bertempat tinggal di sini serta menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di Yogya," katanya.

Sementara itu, pembahasan revisi perda terkait BPHTB sejauh ini juga terus berlangsung dan mendekati final. Berbagai masukan sudah diterima tim pembahas yang terdiri dari unsur legislatif dan eksekutif. Meski pembahasan berjalan dinamis namun dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan. **(Dhi)-f**

TEKAN ANGKA PERCERAIAN

Kemenag DIY Luncurkan Aplikasi Konseling Digital

YOGYA (KR) - Tiap tahun peristiwa nikah di DIY mencapai lebih 25 ribu pasang pengantin. Sementara perceraian tiap tahunnya rata-rata 5.700 kasus. Hal ini menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

Untuk itulah sebagai upaya menekan angka perceraian, Bidang Urusan Agama Islam meluncurkan Aplikasi Konseling Digital (Akida).

"Sudah banyak upaya yang kami lakukan, tapi ternyata belum membuahkan hasil signifikan menekan angka perceraian sehingga kami sangat mendukung inovasi Bidang Urusan Agama Islam ini," tandas Kakanwil Kemenag DIY Edhi Gunawan, Jumat (4/12).

Menurut Edhi, banyak persoalan yang dihadapi keluarga. Untuk itu deteksi awal menjadi sangat penting. "Pengantin baru biasanya belum berpengalaman mengelola masalah keluarga," imbuhnya.

Beruntung menurutnya, DIY memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar Akida dapat disusun dengan formulasi yang tepat. "Kami juga melakukan evaluasi setiap saat agar program dapat berjalan dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Kabid Urais Nadhif menjelaskan, proses kerja aplikasi Akida dengan setiap pasangan pengantin baru, datanya akan terdaftar di KUA sehingga diketahui rekam jejaknya. Data tersebut, lanjut dia akan diketahui konselor untuk memberikan treatment.

"Konseling dipolakan berjenjang mulai dari masjid, desa, dan KUA. Intinya aplikasi ini sebagai upaya preventif sejak dini agar persoalan keluarga dapat terdeteksi,î beber Nadhif sembari menambahkan saat ini terdapat 15 lokasi konseling dengan 5 masing-masing kabupaten/kota terdiri masjid, desa dan KUA serta 49 konselor. **(Feb)-f**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATGAS PENANGANAN COVID-19

PEMULIHAN EKONOMI SEJALAN PENGENDALIAN COVID-19

Ratusan Miliar Rupiah untuk Gerakkan Ekonomi Warga

KR-Ardhi Wahdan

Penyaluran bantuan bagi warga Kota Yogya terdampak Covid-19.

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya melalui Satgas Penanganan Covid-19 mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pemulihan ekonomi. Ratusan miliar rupiah dialokasikan di berbagai sektor guna menggerakkan ekonomi warga. Akan tetapi, pemulihan ekonomi itu pun sangat bergantung dengan pengendalian Covid-19.

"Pemulihan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari protokol pengendalian Covid-19. Artinya, dalam masa pandemi ini tempat usaha baik sektor wisata, hiburan atau kuliner yang akan dikunjungi ialah yang mampu menjalankan protokol dengan serius," tandas Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi.

Oleh karena itu, sembari program pemulihan ekonomi dijalankan maka pemilik atau pengelola tempat usaha harus mampu menegakkan protokol seperti yang tertuang dalam Perwal 51/2020. Begitu pula pengunjung atau masyarakat, protokol umum seperti menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak juga harus disiplin ditegakkan.

Sementara program pemulihan ekonomi yang sudah digulirkan Pemkot Yogya meliputi berbagai lini. Ketua Bidang Pemulihan Ekonomi Kadri Renggono, memaparkan program itu didukung melalui berbagai pos anggaran. Di antaranya APBD Kota Yogya sebesar Rp 121 miliar, Danais Rp 50 miliar serta APBN Rp 86 miliar. "Tapi aspek utama dan pertama dari pemulihan ekonomi ialah tunduk pada protokol Covid-19. Semakin kuat dalam menekan laju kasus Covid-19 maka pemulihan ekonomi bisa berjalan baik," tandasnya.

Program pemulihan ekonomi jangka pendek yang sudah bergulir ialah berbagai bantuan bagi warga terdampak. Antara lain BLT dari pemerintah pusat maupun APBD Kota Yogya hingga bantuan sembako perluasan, PKH, hibah UMKM dan lainnya. Bantuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini karena pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, bantuan yang sudah diterima diharapkan dapat segera dibelanjakan sesuai kebutuhan, terutama di warung-warung tetangga agar terjadi perputaran uang dari level bawah.

Tahap selanjutnya yang dilakukan Pemkot ialah penguatan Gandeng Gendong. Salah satunya melalui kemandirian lorong sayur untuk memenuhi kebutuhan harian serta untuk dijual di warung setempat. Kemudian ada pula paket wisata sepeda yang mulai menyasar rute kampung wisata. Upaya itu merupakan bagian dari konsep 'Dari Jogja untuk Jogja'. "Kami juga berikan pengurangan beberapa pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, PBB dan lainnya," imbuh Kadri.

Sedangkan dalam masa memasuki adaptasi kebiasaan baru, upaya pemulihan ekonomi ialah kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Program ini juga cukup variatif. Salah satunya menggandeng pihak Gojek untuk layanan belanja daring di pasar tradisional. Pemkot juga bekerja sama dengan BI dan Bank BPD DIY untuk penguatan transaksi digital. Dinas terkait bahkan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran bagi kalangan UKM hingga memfasilitasi pameran di pusat perbelanjaan yakni di Lippo Mall, Galeria dan Malioboro Mall.

Selain itu beberapa dinas intensif menggulirkan kegiatan sesuai tupoksi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Seperti Dinas Pariwisata dengan verifikasi hotel, restoran serta usaha kuliner agar menerapkan protokol khusus untuk pengendalian Covid-19. "Kemudian Jogja Cross Culture yang digelar Dinas Kebudayaan kemarin semuanya melibatkan warga kota. Mulai dari para seniman, kru panggung, kru digital dan lainnya," tandas Kadri.

Oleh karena itu, meski pertumbuhan ekonomi tergolong minus, yakni dari 6 persen di triwulan kedua menjadi 2,5 persen pada triwulan ketiga, namun dirinya optimis pada triwulan keempat bisa beranjak naik menjadi 5 persen. Optimisme itu muncul dengan kondisi stabilitas ekonomi yang sudah berjalan. "Yang paling penting sekarang ialah bersama-sama antara kabupaten kota di DIY untuk sinergi mengendalikan Covid-19. Itu kunci pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika nanti vaksin sudah tersedia," katanya. **(Dhi)-f**

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 6243/UN1/DAS.2.1/SAR/PL/2020

Universitas Gadjah Mada dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan menjual/lelang non eksekusi wajib selain Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang e-Auction dengan penawaran secara Closed Bidding yang dapat dilihat di website www.lelang.go.id terhadap Barang Milik Universitas (BMU) sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Lelang pada :
Hari, Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.00 Waktu Server e-Auction (sesuai WIB)
Alamat Domain : https:// *www.lelang.go.id*
Tempat lelang : Ruang Rapat Direktorat Aset, Lantai II Sayap Selatan Gedung Pusat UGM Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

B. Jenis Barang Milik Universitas (BMU) yang dilelang :
1 (satu) paket bangunan Rumah Dinas Blok B-15 dan Blok B-16 di Bulaksumur Universitas Gadjah Mada, dilelang dengan harga limit Rp.32.122.000,00, uang jaminan lelang Rp.15.000.000,00.

C. Lokasi BMU yang akan dilelang :
Bangunan Rumah Dinas Blok B-15 dan Blok B-16 di Bulaksumur Universitas Gadjah Mada

D. Jadwal melihat BMU yang akan dilelang :
Mulai tanggal 7 s.d. 11 Desember 2020 pada **Hari Kerja,** pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB.

E. Persyaratan mengikuti Lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (Email) yang diakses pada sistem Domain https://www.lelang.go.id.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat secara perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang e-Auction pada alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (scan) KTP, NPWP (Ekstensi File.jpg atau.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang Jaminan Lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan diangsur).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain di atas kepada Account masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid/sah.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% melalui nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
5. Obyek lelang dijual dalam keadaan **apa adanya** dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya

F. Ketentuan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan BMU sebagai berikut :
1. sebelum melaksanakan pekerjaan pemenang wajib menyerahkan uang jaminan pembongkaran sebesar Rp.15.000.000,00 dan akan dikembalikan penuh setelah selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM;
2. memperhatikan surat edaran Rektor UGM Nomor 1683/UN1.P/HKL/TR/2020 tentang Pembatasan maksimal kegiatan di Kampus Universitas Gadjah Mada, maka pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid-19;
3. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 25 hari kerja, mulai pukul: 09.00 WIB sampai dengan pukul: 16.00 WIB., terhitung sejak tanggal pemenang melakukan pelunasan dan dikeluarkannya Surat Perintah pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan BMU berupa bangunan rumah dinas Blok B-15 dan Blok B-16 di Bulaksumur Universitas Gadjah Mada oleh Panitia;
4. keterlambatan waktu pekerjaan ini akan dikenakan denda per hari 1 0/00 (satu permil) dari uang jaminan pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan, maksimal 5 % (lima persen);
5. jika tidak dapat menyelesaikan pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia akan menggunakan pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran dengan biaya dari pemenang (jaminan pembongkaran) dan panitia tidak bertanggungjawab atas BMU tersebut;
6. uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan, jika pekerjaan sudah selesai dengan menunjukkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Pengawas;
7. BMU telah diberi tanda oleh Panitia dan dilarang keras mengambil barang yang tidak masuk dalam daftar penjualan;
8. penggalian pondasi menyesuaikan dengan kedalaman fondasi bangunan dan tidak diperkenankan mengangkut tanah;
9. pelaksanaan pekerjaan harus menjaga keamanan, kebersihan, keutuhan jalan, halaman, dan prasarana lingkungan lainnya pada kompleks yang bersangkutan. Akibat dari kelalaian dan kerusakan menjadi tanggung jawab pemenang;
10. pelaksanaan pekerjaan harus mematuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
11. guna menjaga keselamatan, keamanan umum (tenaga kerja dan orang lain) dan lingkungan, maka pemenang harus:
- mengantisipasi polusi debu pada saat pelaksanaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan dengan penyiraman;
- melakukan pengamanan disekitar bangunan tersebut dengan memberikan tanda batas pengaman (police line) atau dengan pagar pembatas/seng, dan sebagainya;
- meminimalkan resiko getaran/dentuman akibat jatuhnya bongkaran bangunan dan tetap berada di area dalam pagar pengaman;
12. tenaga kerja yang diizinkan menginap di area pembongkaran, hanya tenaga yang bertugas menjaga keamanan peralatan, alat berat dan barang bongkaran tersebut maksimal 3 orang;
13. tenaga yang menginap wajib menyerahkan fotokopi KTP/identitas kepada Satuan Keamanan/PK4L atau Panitia Pengawas;
14. harus berusaha mengamankan barang maupun komponen lainnya yang tidak dijual yang berada di lokasi bangunan yang dijual, agar tetap dalam kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang yang akan diperhitungkan dengan jaminan pengambilan barang;
15. pelaksanaan pekerjaan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekitar;
16. semua barang yang telah dijual baik berharga maupun tidak berharga menjadi tanggung jawab pemenang, karena itu harus segera diangkut ke luar lokasi;
17. pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai secara fisik apabila lahan bekas bangunan yang dibongkar sudah berupa hamparan tanah yang ketinggiannya setara dengan ketinggian tanah di sekitarnya dan sudah bersih dari sisa-sisa bangunan rumah dinas yang dijual;
18. untuk pencegahan covid-19, pemenang harus mentaati peraturan sebagai berikut :
- menyediakan hand sanitizer dan alat cuci (dan sabun) untuk para tenaga kerja;
- menyediakan thermometer gun, masker dan sarung tangan untuk para tenaga kerja;
- memberikan vitamin dan asupan makan yang bergizi untuk para tenaga kerja;
- tidak memperbolehkan tenaga kerja yang sakit (ODP dan PDP covid-19);
- secara periodik wajib menyemprotkan desinfektan pada area bangunan rumah dinas yang dibongkar;
- melakukan pemeriksaan dengan thermometer gun untuk tenaga kerja yang memasuki area bangunan rumah dinas yang dibongkar;
19. untuk pencegahan penularan covid-19, maka tenaga kerja harus mentaati peraturan sebagai berikut :
- menggunakan alat pengaman diri: masker dan sarung tangan;
- menjaga jarak aman dengan antar pekerja;
- mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja dan makan pagi/siang;
20. keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Direktorat Aset UGM Lantai 2 Sayap Selatan Kantor Pusat UGM.

Yogyakarta, 07 Desember2020
ttd
Panitia Lelang